

PENGARUH AGAMA TERHADAP PERILAKU MEMILIH PEMIMPIN PADA GENERASI MUDA DIKOTA BANDUNG

¹Ratna Fitria

²Mulyana

³Wilodati

⁴Kama Abdulhakam

Departemen Pendidikan Umum, UPI

email: ratna_fitria@upi.edu; mulya@upi.edu; wilodati@upi.edu; kama.ahakam@upi.edu

Abstrak

Masalah yang sering muncul menjelang pemilihan umum adalah banyaknya partai politik yang lebih mengutamakan pencitraan keimanan dan ketakwaan beragama sebagai modal untuk meraih kemenangan. Lamar melamar terhadap orang yang memiliki jabatan yang tinggi dibidang keagamaan akan sangat laris dan akan selalu menjadi orang yang paling dicari ketika menjelang pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana agama mempengaruhi perilaku memilih pada generasi muda?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali nilai keyakinan beragama yang dimiliki generasi muda. Penelitian ini akan melibatkan para pemuda yang berada dikota Bandung. Instrument yang digunakan untuk mengukur variable adalah Skala Guttuman dengan menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten yaitu ya dan tidak, nilai ya (1) dan nilai tidak (0). Adapun hasil penelitian dengan menggunakan korelasi kendall's tau dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,021 yang berarti bahwa tidak ada hubungan secara signifikan antara Agama seseorang dengan perilaku memilih.

Kata Kunci: Perilaku memilih, Generasi Muda, Agama

Abstract

The problem that often arises before the general election is that there are many political parties that prioritize the image of faith and religious piety as capital to achieve victory. Applying for people who have high positions in the field of religion will be very in demand and will always be the most sought after people when approaching the general election. This research was conducted to find out how religion affects voting behavior in the younger generation. The research approach used is a quantitative approach. This approach is used to explore the values of religious beliefs owned by the younger generation. This research will involve youths in the city of Bandung. The instrument used to measure the variable is the Guttuman Scale using two firm and consistent answers, namely yes and no, yes (1) and no (0). As for the results of the study using the Kendall's tau correlation, it can be seen that the significance value is 0.021, which means that there is no significant relationship between a person's religion and voting behavior.

Keywords: voting behavior, youth, religion

Pendahuluan

Isu mengenai agama dan politik di Indonesia tidak pernah padam, selalu berkobar dan bergelora, berbagai cara dilakukan untuk memperoleh suara terbanyak salahsatunya dengan melibatkan agama. Setiap parpol berduyun-duyun mencari dukungan para pemimpin Islam, tidak jarang mereka mendatangi pesantren-pesantren dan masjid-mesjid demi mendulang suara yang besar. Hal tersebut dilakukan karena Partai politik memiliki anggapan bahwa kemenangan akan dapat diraih dengan mudah asal agama yang dianut oleh calon pemimpin yang akan dipilih sama dengan agama mayoritas, sehingga tidak aneh jika calon seorang pemimpin berlomba-lomba memperlihatkan keimanan dan ketakwaannya untuk meraup jumlah suara yang banyak. Tribun news memberitakan bahwa Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden karena Ma'ruf Amin beragama Islam yang non partai. Kepemimpinan Ma'ruf-pun sangat gemilang sehingga tidak usah dipertanyakan lagi, beliau menjabat sebagai ra'is aam PBNU dan Ketua MUI, sedangkan dalam bidang politik dan kebhinekaan, Ma'ruf amin menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila.

Dimasa lalu para ilmuwan sosial memberlakukan agama sebagai sumber stabilitas politik. Agama dipercaya dapat memberikan justifikasi atau legitimasi supranatural atas ketidakadilan dalam masyarakat. (mujadi saiful, 2007:9). Bahkan agama memiliki peranan yang besar dalam pembebasan negeri ini.

Tidak dapat dipungkiri, agama di Indonesia memiliki peranan yang sangat besar, bahkan terbentuknya Negara Indonesia tidak terlepas dari peran agama, para kiyai memiliki andil yang kuat dalam menentukan dasar Negara ini. Sejarah mencatat, sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai timbul agitasi militan terhadap Belanda yang dipelopori oleh para elit agama seperti kiyai, haji, guru dan sebagainya. Para elit agama ini berhasil memperkuat dan meningkatkan pengaruhnya atas masyarakat petani, sedangkan institusi keagamaan seperti pondok pesantren diubah menjadi semacam instrumen yang efektif bagi kampanye politik untuk menentang dan melemahkan penguasa kolonial.

Penentangan dibawah naungan para ulama dan elit agama atas Belanda seperti perang Jawa (1820-1825) atau Pemberontakan Petani Banten (1888) yang lebih dikenal dengan nama perang terbuka, sedangkan perang terselubung" (*silent protest*) dilakukan oleh Kiai Ahmad Rifa'i, pemimpin Sekte Rifa'iyyah di pedalaman Jawa Tengah. Sartono Kartodirdjo telah mendokumentasikan dengan baik fakta-fakta socialperlawanan ulama ini dalam bukunya, antara lain, *Protest Movement in Rural Java, Religious Movement in Java in the 19th and 20th Centuries*, dan *The Peasant Revolt of Banten in 1888*.

Berkaca dari peristiwa-peristiwa yang menimpa bangsa ini dan peran agama yang mendominasi serta ketakutan para pemimpin yang tidak terpilih dalam pemenangan suatu jabatan public maka dirasakan perlu untuk mengetahui berapa besar factor agama mempengaruhi perilaku memilih pemimpin?

Berdasarkan survai yang dilakukan Maarif Maarif Institute, sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan, kota Bandung sebagai urutan kedua setelah Yogyakarta dengan nilai 80,64. Hal ini menjadi

latar belakang mengapa penelitian dilakukan dikota Bandung, dan dengan dilatar belakang nilai keimanan yang kuat dan toleransi yang tinggi tentu membawa implikasi yang baik bagi generasi mudanya, sehingga penelitian ini akan mampu menjawab kekhawatiran para politikus, apakah benar agama menjadi factor utama seseorang dipilih oleh pemilih, atau ada faktor lain yang lebih dominan dalam diri para pemilih.

Landasan teori

Penelitian tentang perilaku memilih ini tidak lepas dari teori klasik perilaku memilih. Penelitian mengenai perilaku memilih ini dimulai sejak tahun 1948 dengan menghasilkan tiga pendekatan, yaitu:

I. Pendekatan Sosiologis atau *Social Structural*

Pendekatan sosiologis atau lebih tepatnya pendekatan social structural untuk menerangkan perilaku pemilih, secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis dan model penjelasan makrososiologis (Roth 2008: hlm24). Model penjelasan mikrososiologis senantiasa dikaitkan dengan sosiolog Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari *Columbia University*, oleh karena itu model ini juga disebut mahzab Columbia (*Columbia School*). Model penjelasan makrososial dari Seymour Martin Lipset dari Stein Rokkan didasarkan atas pengamatan perilaku pemilu menurut Lazarsfeld. Model ini menelaah perilaku pemilu diseluruh tingkatan atau lapisan masyarakat secara keseluruhan, yang pada akhirnya melahirkan penjelasan mengenai terbentuknya sistem partai di Eropa.

Dasar model penjelasan mikrososiologis berawal dari teori lingkaran sosial yang diformulasikan oleh Georg Simmel (1980) (Roth, 2008: hlm61). Menurut teori ini, setiap manusia terkait didalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, rekan-rekan, tempat kerja, dan sebagainya. Paul F. Lazarsfeld mendefinisikan bahwa setiap individu hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggal, pekerjaan dan usia sangat mempengaruhi keputusan pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya tersendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi. Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri sebab pada dasarnya setiap orang ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sekitarnya. (bdk. Lazarsfeld et al. 1994, 1968: hlm148).

II. Pendekatan Sosial

Sementara peneliti pemilu dari *Columbia School* lebih mengaitkan perilaku pemilu dengan konteks kemasyarakatan dimana individu tersebut bernaung, maka sekelompok ahli ilmu sosial dari *University of Michigan* di Ann Arbor lebih menempatkan individu sebagai pusat perhatian mereka.

Pendekatan sosial psikologis membedakan antara kekuatan, arah, dan intensitas orientasi, baik dalam orientasi isu maupun orientasi kandidat. Tema-tema khusus hanya akan mempengaruhi perilaku pemilih individu apabila memenuhi tiga persyaratan dasar, yaitu tema tersebut harus mampu ditangkap oleh pemilih, tema tersebut dianggap penting oleh para pemilih, dan pemilih akan menyesuaikan dengan posisi pribadinya (baik secara positif atau negatif) terhadap konsep pemecahan permasalahan yang ditawarkan oleh sekurang-kurangnya satu partai. (Campbell 1960: hlm170)

III. Pendekatan *rational-choice* (perilaku pemilu yang rasional)

Pusat perhatian berbagai pendekatan teoritis mengenai perilaku pemilu yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Menurut pendekatan *rational choice*, yang menentukan dalam sebuah pemilu bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural, atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian yang rasional dari warga yang cakap.

Menurut Key masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya. Penilaian ini juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap pemerintahan dimasa yang lampau. Apabila hasil penilaian pemerintah yang berkuasa (juga bila dibandingkan dengan pendahulunya) positif, maka mereka akan dipilih kembali. Apabila hasil penilaiannya negatif, maka pemerintahan tersebut tidak akan dipilih kembali (Key 1966: hlm61).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif yaitu berupa analisis data distribusi frekuensi dari jawaban atas pertanyaan kuesioner dan dengan menggunakan pengujian nonparametric correlation dengan menggunakan korelasi Kendall's tau untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dan arah hubungan variabel yang diteliti. Lokasi Penelitian di Kota Bandung dengan populasi sampling penelitian ini adalah Generasi Muda yang telah mengikuti Pemilu 2019 sebanyak 286 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan *Probability Sampling* sebagaimana yang dikemukakan oleh Bungin (2011: hlm116) bahwa rancangan sampel probabilitas dilakukan dengan cara penarikan sampel yang didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

Alasan penulis menggunakan metode sampling tersebut adalah dikarenakan latar belakang generasi muda yang beragam sehingga perlu melakukan penarikan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada.

Instrument yang digunakan untuk mengukur variable adalah Skala Guttuman dengan menggunakan dua jawaban yang tegas dan konsisten yaitu ya dan tidak, nilai ya (1) dan nilai tidak (0). Disamping itu dilakukan pula wawancara untuk memperkuat dan memperkaya analisis hasil penelitian dari kuesioner

Hasil Penelitian

Keyakinan Beragama mempengaruhi Perilaku memilih pemimpin

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan nonparametric correlation dengan menggunakan korelasi kendall's tau dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,021 yang berarti bahwatidak ada hubungan secara signifikan antara Agama seseorang dengan perilaku memilih, dan hlm tersebutpun diperkuat dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Adapun data tersebut sebagai berikut:

No	Pernyataan	Presentasi	
		Ya	Tidak
1	Memilih pemimpin karena pemimpin tersebut seagama	74%	26%
2	Memilih sesuai yang dianjurkan oleh ulama/ahli agama	53%	47%
3	Memilih pemimpin karena ajakan ulama atau ahli agama	11%	89%
4	Memilih pemimpin karena dipilih juga oleh orangtua	11%	89%
5	memilih pemimpin karena banyaknya teman yang memilih pemimpin yang sama	5%	95%
6	Agama yang dianut pemimpin tidak sama, maka tidak akan memilihnya	44%	56%
7	Pemimpin yang berasal dari partai agama pasti pemimpin yang baik	14%	86%
8	pemimpin yang diusung oleh partai yang seagama pasti yang terbaik	16%	84%

Sikap untuk menunjuk seseorang menjadi pemimpin bagi umat Islam senantiasa didasarkan pada keyakinan mereka akan syariat Islam yang menjadi landasan dalam setiap tindakannya dalam kehidupan. Hlm ini pun terlihat pada para generasi muda muslim, khususnya para Mahasiswa yang berada dikota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara responden meyakini bahwa mereka memilih pemimpin sesuai dengan apa yang apa yang dikehendaki dirinya sendiri. Para ulama memang biasanya memberikan anjuran, anjuran ulama yang dimaksud dalam hlm ini bukanlah anjuran tentang siapa orangnya yang harus dipilih, tetapi anjuran yang terkait dengan bagaimana cara memilih pemimpin dan kriteria pemimpin yang bagaimana yang sesuai dengan ajaran Islam.

Keyakinan agama yang menjadi dasar generasi muda dalam menentukan sikap untuk memilih pemimpin ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Imam An-Nawawi (VI/291):

، وَأَجْمَعُوا عَلَيْنَا هُدًى جُبِعَ عَلَيْنَا الْمُسْلِمِينَ نَصَبُ خَلِيفَةٍ وَجُوبُهُ الشَّرُّ عَلَا بِالْعَقْلِ
، وَغَيْرِ هَآئِهِ جُبِيَ بِالْعَقْلِ بِالشَّرِّ عَفَا طِلَاؤُ أَمَامَا حُكَيْعِنَا لِأَصْمَاءَ نَهَقَالَ: لَا يَجِبُ

Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya wajib atas kaum muslim mengangkat seorang *khlmifah*. Kewajiban ini (mengangkat seorang *khlmifah*) ditetapkan berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Adapun apa yang diriwayatkan dari al-Asham bahwa ia berkata, '(Khilafah) tidak wajib'.

Di samping sikap untuk memilih, keyakinan yang dilandasi ajaran Islam yang tertanam pada diri generasi muda yang menjadi responden ini pun tampak pada sikap mereka dalam menjatuhkan pilihan kepada siapa posisi pemimpin akan diberikan. Sebagian besar dari mereka meyakini bahwa pemimpin yang harus mereka pilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka dan tidak memilih pemimpin yang tidak seagama.

Hal ini merujuk kepada Pihak yang meyakini bahwa memilih dan mengangkat pemimpin dari umat bukan muslim itu dilarang dalam Islam di antaranya mengemukakan dalil-dalil dari QS. Al-maidah (5): 51: yang berisi bahwa Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Pada satu sisi, keyakinan ini selaras dengan pendapat Baits (2015) yang mengemukakan bahwa ulama sepakat, memilih pemimpin kafir hukumnya terlarang. Baits (2015) menukil kata-kata Al-Qadhi Iyadh, "Para ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Termasuk ketika ada pemimpin muslim yang melakukan kekufuran, maka dia harus dilengserkan" (Syarah Sahih Muslim, an-Nawawi, VI/315).

Meskipun sebagian besar responden berkeyakinan bahwa harus memilih pemimpin yang seagama dan tidak memilih yang berbeda agama, masih terdapat sebagian yang berkeyakinan bahwa seseorang yang berbeda agama pun dapat mereka pilih sebagai pemimpin. Jika merujuk pada penjelasan dari Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa negara yang adil itu disokong oleh Allah meskipun dipimpin oleh seorang yang bukan muslim dan negara yang despotik tidak disokong Allah meskipun kepala negaranya seorang muslim, maka sikap sebagian kecil responden yang menyatakan dapat memilih pemimpin yang berbeda agama tidaklah menyalahi ajaran Islam. Hlm ini didukung oleh pendapat Ibn. Taimiyah (1977, XXVIII hlm. 253) dalam *Dar al-Ifta wal irsyad*:

Sesungguhnya Allah menyokong negara yang adil meskipun kafir (pemimpinnya) dan tidak mendukung negara yang despotik meskipun Muslim (pemimpinnya). Dunia itu

dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran dan keadilan dan dunia tidak dapat tegak dengan modal kezaliman dan keislaman.

Maka berdasarkan hal tersebut apabila ada pertanyaan siapakah yang akan dipilih, pemimpin muslim yang tidak dapat memimpin atau non muslim yang dapat memimpin? Maka apabila jawabannya pemimpin non muslim yang mampu memimpin, hal tersebut tidaklah dapat disalahkan Karena memilih pemimpin non-muslim di tengah masyarakat muslim hukumnya diperbolehkan dengan mengingat sebab yang menyertainya, yaitu Ketika non muslim melakukan penistaan terhadap umat Islam.

Kecenderungan perilaku memilih dalam menunjuk pemimpin

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya bahwa setiap keputusan untuk menjatuhkan pilihan kepada seseorang menjadi pemimpin tidak terlepas dari berbagai alasan yang mendasarinya, demikian pula halnya dengan Generasi muda yang menjadi responden dalam penelitian ini. Terdapat sejumlah alasan yang mendasari responden menjatuhkan pilihan kepada seseorang untuk menjadi pemimpinnya. Alasan-alasan inilah yang menjadi bukti perilaku generasi muda dalam memilih pemimpin.

Perilaku yang dimaksud di sini adalah suatu karakteristik penting dari individu untuk melakukan kegiatan tertentu yang merupakan hasil gabungan dari berbagai faktor psikologis, faktor fisik, biologis, dan kondisi sosial yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Sejalan dengan hlm itu, Edwards; Secord, dan Becman (Azwar, 2003, hlm. 5) mengemukakan bahwa perilaku merupakan derajat sikap positif atau sikap negatif terhadap suatu objek psikologis, sebagai keturunan dari perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan *predisposing* tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar.

Terkait dengan dengan perilaku dalam berpolitik, khususnya dalam hal perilaku memilih, partisipasi politik masyarakat menjadi bagian dari proses pemilihan pemimpin suatu daerah atau negara. McClosky (1972), berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Merujuk pada konsep tersebut, perilaku yang ditunjukkan responden dalam memilih pemimpin didasari oleh sikap mereka yang beragam. Kecenderungan sikap responden sebagai umat muslim memilih seseorang menjadi pemimpin karena seagama tampak begitu dominan. Hal ini dipandang wajar, mengingat perilaku memilih pada diri seseorang akan dipengaruhi dengan sangat kuat oleh kehidupan sosial mereka, yang salah satunya adalah lingkungan agama yang mereka yakini dimana pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Terkait hlm ini, Elmira (Antunes, 2010: 147-148) mengindikasikan adanya kondisi yang mempengaruhi pilihan politik, yang salah satunya adalah *religion* (agama).

Sementara itu, ditinjau dari adanya pengaruh orang lain untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin tampak tidak

banyak berpengaruh terhadap perilaku politik responden, baik pengaruh dari ulama, orang tua, maupun teman sepergaulannya. Di sini tampak bahwa pengaruh internal individu lebih berperan, sebagaimana dikemukakan Antunes (2010, hlm. 146) bahwa dalam menentukan pilihan politik terdapat tiga esensi yang salah satunya adalah pengaruh pribadi (*personal influence*).

Ketika dihadapkan pada persoalan bagaimana menjelaskan fenomena adanya pergeseran/perubahan sikap atau perilaku pemilih yang sama dengan status sosial yang sama dalam menentukan pilihan dari satu proses pemilihan ke proses pemilihan lainnya, pemikiran akan adanya variabel-variabel lain yang turut menentukan dalam mempengaruhi perilaku memilih seseorang muncul sebagai suatu pemikiran yang memandang perilaku pemilih dengan lebih rasional.

Pengaruh lingkungan religi, lingkungan sosial, maupun aspek internal individu mungkin dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Namun, ketika individu pemilih mengalami perkembangan daya pikir dan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai hlm, setiap perkembangan isu-isu politik akan senantiasa menjadi pertimbangan penting mereka akan kebermanfaatan keputusan memilih yang diambilnya. Hal seperti ini banyak terjadi pada kalangan pemilih generasi muda, terutama mahasiswa yang secara intelektual mereka dibiasakan untuk selalu mengolah daya nalarnya untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip kebermanfaatan dari suatu keputusan.

Terkait dengan keputusan untuk menentukan pilihan sebagai perilaku memilih, para pemilih dari kalangan generasi muda “intelektual”, tampak menunjukkan kecenderungan yang sangat besar untuk memilih pemimpin dengan mempertimbangkan hal-hal yang lebih bersifat rasional dan objektif akan pemimpin yang dipilihnya. Kecenderungan ini tampak dari pertimbangannya untuk memilih pemimpin yang memiliki pengalaman kinerja dan pengalaman dalam kepemimpinan yang memadai. Di samping itu, visi-misi setiap calon pemimpin serta latar belakang pendidikannya pun menjadi pertimbangan generasi muda untuk menentukan pilihannya.

Perilaku ini menunjukkan bahwa sebagai pemilih generasi muda yang terdidik, tampak lebih mengutamakan pemikiran-pemikiran rasional dalam memilih pemimpin, dimana mereka sedikit banyak dapat memprediksi konsekuensi-konsekuensi atas pilihan yang berbeda dan memungkinkan adanya opsi lain dalam menetapkan pilihannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Antunes (2010, hlm. 158) bahwa dalam teori memilih rasional terdapat tiga premis fundamental, yakni: (1) *all decisions - those that are made by voters and political parties - are rational*, dimana perhatiannya terfokus pada prinsip-prinsip kebermanfaatannya; (2) *the democratic political system implies a level of consistency that supports predictions about the consequences of decisions made by voters and political parties*, dalam hlm ini, para agen (pemilih, partai, dan pemerintah) bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dimana mereka dapat memprediksi konsekuensi-konsekuensi atas pilihan yang berbeda; (3) *the democratic system assumes - despite the consistency stated in the*

previous point, dalam hlm ini suatu tingkat ketidakpastian atau tingkat kepastian memungkinkan terdapatnya opsi yang berbeda.

Perilaku memilih yang didasarkan pada pertimbangan rasional terhadap isu-isu politik yang berkembang ini dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan politik para generasi muda yang pada umumnya mereka cari dan gali sendiri, terutama yang berkaitan dengan isu-isu partai politik yang mengusung calon pemimpin yang akan dipilihnya. Sementara itu, kurangnya sosialisasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat menjadikan pandangan para mahasiswa ini cenderung menunjukkan idealisme yang cukup tinggi, karena mereka lebih banyak memperoleh pemahaman isu-isu politik ideal secara teoretis daripada secara praktis.

Berdasarkan tinjauan terhadap ketiga sudut pandang mengenai kecenderungan perilaku memilih pada generasi muda sebagai responden dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pemikiran rasional-objektif mengenai calon pemimpin yang akan dipilih menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi mereka dalam menentukan pilihan. Di samping itu, faktor agama pun senantiasa melandasi pertimbangan mereka dalam memilih, meskipun tidak begitu kuat. Sedangkan aspek psikologis seperti kedekatan tampaknya tidak menjadi perhatian dan pertimbangan dalam menjatuhkan pilihan, sedangkan faktor rasionalitas seperti keuntungan pribadi, tidak mau dirugikan waktu dalam mencari sosok seorang pemimpin menjadi alasan yang kuat bagi pemilih pemula dan hlm ini menunjukkan bahwa pemilih muda lebih rasional dalam menentukan pilihannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa agama tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan pemimpin, generasi muda akan lebih memilih pemimpin yang memiliki kinerja yang baik dan mampu membawa kemajuan yang signifikan bagi daerahnya.

Belajar dari hlm tersebut seharusnya para penggiat partai politik mulai berbenah diri untuk membuat rekam jejak yang bagus dimata pemilih, sehingga dengan memiliki reputasi yang baik para pemilih akan langsung menjatuhkan pilihannya tanpa mempertimbangkan factor yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik & Der Leeden , A. C. Van. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1986.
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Matan Hadits Arba'in* An-Nawawi. Solo: Insan Kamil.
- Antunes, R.J.S. (2010). "Theoretical Models of Voting" in *Exedra*, No.4, pp.145-170.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifudin. 2003. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baits, A. N. (2015, September 3). *Konsultasi Syariah*. Retrieved Oktober 12, 2015, from KonsultasiSyariah.com:
- Balandier, Georges. (1986). *Antropologi Politik*. Jakarta: Rajawali
- Bottomore.T.B. (2006). *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute
- Budiardjo, Miriam. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2011. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- . 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

- _____. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Diskursu Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Premada Media Group.
- Campbell, A. et. al. 1960. *The American Voter*. Suvey Research Centre. University of Michigan. USA: John Wiley and Sons Inc.
- Fatimah, Siti. (2004). *Preferensi dan Persepsi Politik Orang Bandung, Enggan jadi Politikus*. Bandung: BIGS Firmanzah. (2007). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (2008). *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi)*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Garna, Judistira K.. *Materi Kuliah Teori-teori Ilmu Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Hamijoyo, Santoso. (2005). *Komunikasi Partisipatoris*. Bandung: Humaniora
- Harrop Martin and William L. Miller. (1987). *Elections and voters (a comparative introductions*. London: Macmillan
- Huntington, P. Samuel. (2004). *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang sedang Berubah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ismail, Mage Ruslan. (2005). *Komat Kamit Politik*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Kantaprawira, Rusadi. (2004). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar baru Algensindo
- Key Jr., V. O. (1966). *The Responsible Electorate, Rationality in Presidential Voting 1936-1960*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lazarsfeld. Paul F. (1968). *The People's Choice: How The Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*. Columbia: Columbia University Press.
- McClosky, H. 1972. *Political Participation*, International Encyclopedia of The Social Science. The Macmillan Company and Free Press. New York.
- Michael dan Phillip Altoff. (2003). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Musa, Kazhim dan Alfian Hamzah. (1999). *5 Partai dalam Timbangan*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Nasution, S. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, S. (1981). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Rafael, Raga Maran *Pengantar Sosio;ogi Politik P T Rineka Cipta, Jakarta 2007*
- Robert, E Goodia dan Hans Dieter Klingemaan. (1998). *A New Handbook of Political Science*, New York: Oxford University Press Inc.
- Roth,Dieter. (2008). *Studi Pemilu Empiris (Sumber, Teori-teori, Instrumen, dan Metode)*. Jakarta: Lembaga Survai Indonesia
- Rush, Michael dan Philip Althoff. (2003). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saeffulloh, Fatah,Eef. (1998). *Bangsa saya yang Menyebalkan*. Bandung: Rosda
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suryadi, Karim. (2002). *Civicus Vol.1 No.2*. Bandung: Jurusan PMPKn Universitas Pendidikan Indonesia
- Syamsudin, Tavinur. (2005). *Postur Pemilu 2004 Kabupaten Bandung*. Bandung: Eksyezet Bandung
- Tamin, Azian. (2005). *Profil Politik Indonesia Pasca Orde baru*. Jakarta: PSPI FISIP UNAS dan PSP Madani Institute
- Tanthowi, Pramono. (2005). *Kebangkitan Politik Kaum Santri*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP)
- Thohir, Ajid. (2002). *Gerakan Politik Kaum Tarekat*. Bandung: Pustaka Hidayah
- Yin K. Robert. (2002). *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sumber Lain

- [Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata. \(2004\). Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective. Indonesia's Populations Series No.7. Singapore. Institute of southeast Asean Studies.](#)
- [Dalton, Russell. J. 2000. Parties Without Partisans. Political Change In Advenced Industrial Democracies.Martin P Wattenberg.Oxford:OUP](#)
- Downs, Anthony. (1968). *Okonomische Theorie der Demokratie*, Tubingen: New York 1957
- [Evans, Kevin R. 1992.The History of political Parties and Gernal Election ini Indonesia. Jakarta. Aries Consultancies](#)

- Fiorina, Moris P. (1981). *Retrospektive Voting in American National Elections*. New Haven/London.
- Gaffar Affan. 1992. *Javanese Voters: A case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta. Gajahmada University Press
- King Dwight Y. 2001. *Hlmf-Hlntered Reform: Electoral Institutions and The Struggle for Democracy in Indonesia*. Wesport.Connecticut. Praeger
- Liddle R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta. LP3ES
- Liddle R. William dan saiful Mujani. 2003. *The Power of Leadership: Explaining Voting Behavior in the New Indonesian Democracy*. Laporan Penelitian
- "Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik". Kompas, 1 September 2000
- 2007. *Party an religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*. Laporan Penelitian.
- Lesmana, Tjipta. 2005. "Persepsi Negatif dan Perilaku Politik di DPR". Tersedia: <http://www.Kompas.co.id>
- Mallarangeng, Andi. 1997. Contextual Analysis on Indonesian Electoral Behavior. Disertasi doctoral
- Nugroho. (2004). *Perilaku Politik Elite Parpol*.<http://www.ialf.edu>
- Saiful, Mujani dan William Liddle. (2000). *Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik*. Tersedia:<http://www.Kompas.com>
- Qodari, Muhammad. 2007. "Split Ticket-Voting dan Perilaku Pemilih di Indonesia". Manuscrip Penelitian